

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Penelitian**

Perubahan sistem pemerintahan di Indonesia dari sentralisasi menjadi desentralisasi dimaksudkan untuk memberikan wewenang kepada pemerintah daerah dalam mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya berdasarkan asas otonomi daerah yang ditandai dengan diberlakukannya Undang-Undang tentang Pemerintah Daerah Nomor 22 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dimana kedua Undang-Undang ini menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi secara nyata di Indonesia pada Januari 2001. (Sriparno dan Sari, 2015:369)

Amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 dilakukan berdasarkan pertimbangan adanya ketidaksesuaian dengan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi daerah, sehingga diterbitkanlah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas serta efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan memperhatikan berbagai aspek baik antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah ataupun hubungan antar pemerintah daerah. Kemudian untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah, pemerintah menerbitkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan tujuan agar hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam

serta sumber daya lainnya dapat dilaksanakan secara adil dan selaras. Eksistensi otonomi daerah terus ditingkatkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang memberikan pembahasan lebih detail dari undang-undang sebelumnya. (Korry, 2018:77)

Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah menegaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah harus dilaksanakan secara tertib, taat pada peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, efisien, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatuhan. Oleh karena itu pengukuran kinerja keuangan daerah menjadi sangat penting untuk menilai pengelolaan keuangan daerah, dimana salahsatu hasil dari penilaian kinerja keuangan pemerintah daerah dapat menggambarkan potensi daerah dalam merealisasikan pendapatannya dengan menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai pelaksanaan pemerintahan, memberikan pelayanan kepada masyarakat serta berbagai kegiatan pembangunan daerah dengan tidak bergantung kepada bantuan dari pemerintah pusat.

Sejalan dengan hal tersebut, Halim (2007:230) menjelaskan bahwa salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dimana analisis rasio keuangan tersebut dapat digunakan untuk:

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membangun penyelenggaraan otonomi daerah;

2. Mengukur efektifitas dan efisiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah;
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya;
4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam pembentukan pendapatan daerah;
5. Melihat pertumbuhan atau perkiraan perolehan pendapatan dan pengelolaan yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Pendapatan daerah dapat berasal dari beberapa sumber yang terdiri dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer, Pinjaman Daerah serta Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.

Menurut Putra (2018:152) Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang berasal dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan serta Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah.

Sumber pendapatan daerah tingkat 1 (provinsi) selain PAD adalah Dana Transfer. Komponen Dana Transfer yaitu Dana Perimbangan (terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil) Transfer Pemerintah Pusat Lainnya (terdiri dari Dana Otonomi Khusus dan Dana Penyesuaian), disamping itu pendapatan daerah juga dapat diperoleh dari Pinjaman Daerah.

Dana Transfer menurut Mamuka dan Elim (2014:650) merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Adapun Pinjaman Daerah merupakan alternatif yang dilakukan oleh daerah berdasarkan ketentuan yang sudah diatur dalam undang-undang untuk memenuhi kebutuhan daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat yang disebabkan oleh sumber-sumber penerimaan daerah dari Pendapatan Asli Daerah, Dana Transfer dan Lain-lain Pendapatan yang Sah tidak mampu menutup Belanja Daerah sehingga pemerintah daerah memerlukan tambahan dana untuk memenuhi kebutuhannya.

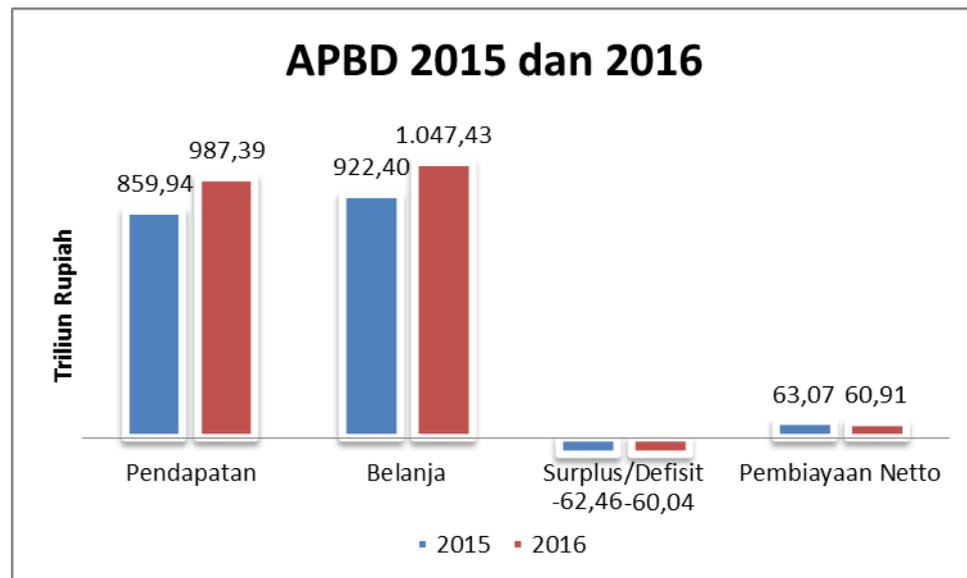
Pembangunan daerah sejatinya merupakan amanat yang diemban oleh setiap pemerintah daerah untuk memenuhi kewajibannya menyediakan pelayanan publik dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan tentu membutuhkan dana yang tidak sedikit, sehingga pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan sumber-sumber pendapatan daerah untuk mengimbangi belanja daerah yang dari tahun ke tahun cenderung mengalami kenaikan.

Hal ini sejalan dengan pendapat dari Rozali (2002) dalam Putra (2018:151) yang mengatakan bahwa “.....pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan berhubungan serta merupakan satu kesatuan alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah”.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa melalui kebijakan desentralisasi, dimana daerah diberikan kewenangan untuk mengelola sendiri keuangannya menyebabkan jumlah pendapatan daerah harus lebih besar dibandingkan jumlah belanja daerah untuk menghindarkan daerah dari kesulitan keuangan dan pada

akhirnya menyebabkan pemerintah daerah gagal dalam memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat.

Berikut ini adalah grafik pendapatan dan belanja daerah dalam APBD 2015-2016 secara nasional (konsolidasi).



Sumber: Ringkasan APBD 2016, DJPK

**Gambar 1.1**  
**APBD 2015-2016 Secara Nasional (Konsolidasi)**

Berdasarkan gambar diatas, diketahui bahwa secara nasional (konsolidasi) anggaran pendapatan dan belanja daerah yang tertuang dalam APBD tahun anggaran 2016 mengalami peningkatan dibandingkan APBD tahun anggaran 2015, dimana anggaran pendapatan naik sebesar 127,45 Triliun Rupiah sedangkan untuk anggaran belanja naik sebesar 125,03 Triliun Rupiah dari tahun sebelumnya. Sedangkan defisit anggaran tahun 2016 turun sebesar 2,42 Triliun Rupiah dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2015, hal ini diakibatkan karena peningkatan pendapatan daerah yang lebih besar dibandingkan dengan peningkatan belanja daerahnya. (DJPK, 2016)

Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi angka belanja daerah, maka akan semakin tinggi pula dana yang dibutuhkan untuk menutup belanja daerah tersebut agar daerah terhindar dari tekanan fiskal, sehingga pemerintah daerah dituntut untuk terus berupaya meningkatkan pendapatan daerahnya melalui optimalisasi potensi-potensi daerah agar dapat memenuhi kebutuhannya tanpa bergantung pada Dana Transfer dari pemerintah pusat atau Pinjaman Daerah.

Muda (2012:32) juga mengatakan bahwa “implementasi terkait kebijakan desentralisasi fiskal dilakukan melalui dua instrumen utama yaitu pemberian kewenangan pada pemerintah daerah untuk memungut Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta perimbangan keuangan yang didalam konteks APBN diberikan nomenklatur transfer ke daerah.....dimana implementasi kedua kebijakan desentralisasi tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemandirian fiskal daerah, stabilitas keuangan serta keberlanjutan program pembangunan daerah”.

PAD menjadi perhatian utama dalam pengelolaan keuangan daerah, karena selain tingkat PAD akan berdampak pada pembangunan daerahnya, PAD juga akan mempengaruhi tingkat ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat dan pinjaman daerah yang dapat menunjukkan sejauh mana kemandirian keuangan suatu daerah, semakin mandiri suatu daerah maka ketergantungan terhadap Dana Transfer dari pemerintah pusat dan Pinjaman Daerah akan semakin rendah karena daerah tersebut akan mampu membiayai belanja daerah dari Pendapatan Asli Daerahnya sendiri.

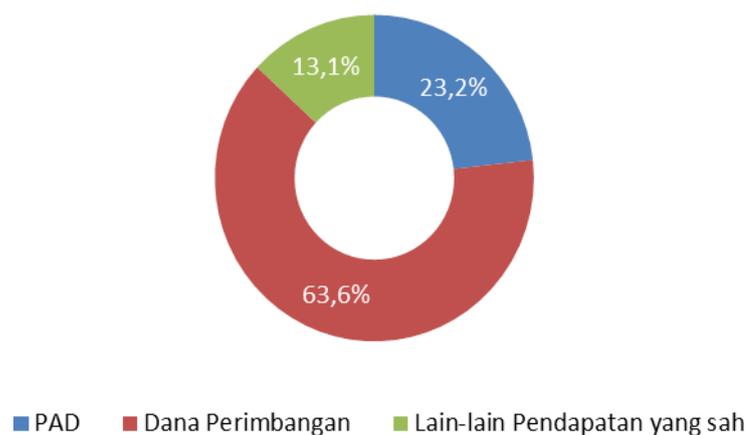
Sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Sukadana (2010) dalam Yoda dan Febriani (2019:122) bahwa kemandirian keuangan daerah merupakan

kemampuan keuangan suatu daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerahnya serta menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama PAD. Semakin tinggi kemandirian keuangan suatu daerah menunjukkan bahwa daerah tersebut semakin mampu membiayai pengeluarannya sendiri tanpa bantuan dari pemerintah pusat.

Menurut pendapat Hendawati et.al. (2019:3) kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain, misalnya bantuan pemerintah pusat atau pinjaman.

Untuk menggambarkan hubungan PAD dan kemandirian keuangan daerah, Berikut ini adalah diagram yang menunjukkan komposisi pendapatan daerah secara nasional (konsolidasi) tahun anggaran 2016.

### Komposisi Pendapatan

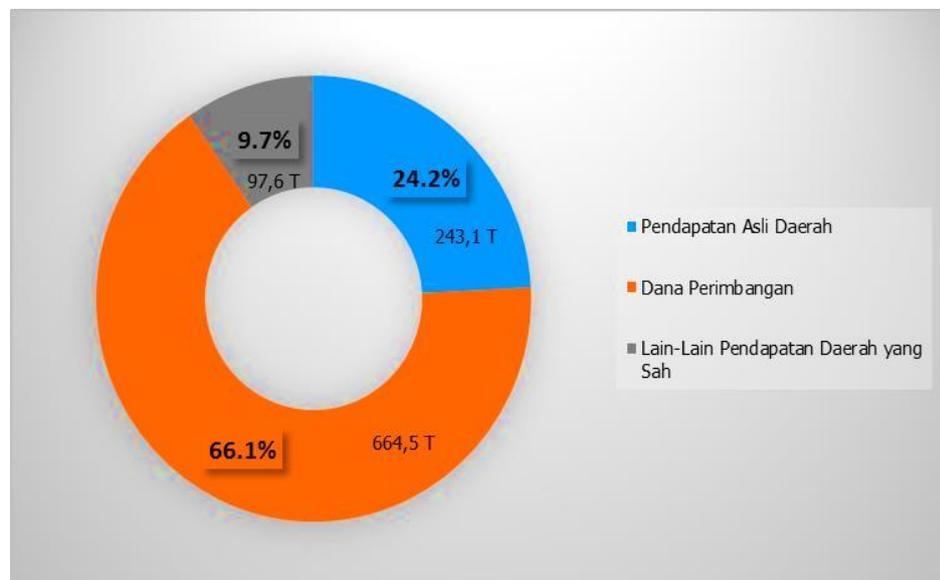


Sumber : Realisasi APBD 2016, DJPK

**Gambar 1.2**  
**Komposisi Pendapatan Daerah 2016 Secara Nasional (Konsolidasi)**

Berdasarkan gambar diatas, komposisi pendapatan daerah secara nasional didominasi oleh Dana Perimbangan dari pemerintah pusat dengan persentase 63,6% sedangkan Pendapatan Asli Daerah memiliki porsi yang lebih kecil yaitu 23,2% sementara itu 13,1% dari pendapatan daerah diperoleh dari Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Sebagai pembandingan, berikut ini adalah komposisi pendapatan daerah secara nasional (konsolidasi) tahun anggaran 2017.



Sumber : Realisasi APBD 2017, DJPK

### **Gambar 1.3** **Komposisi Pendapatan Daerah 2017 Secara Nasional (Konsolidasi)**

Gambar diatas menunjukkan bahwa Dana Perimbangan masih mendominasi komposisi pendapatan daerah sebesar 66,1% sedangkan porsi Pendapatan Asli Daerah hanya sebesar 24,2% dan sisanya 9,7% merupakan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Berdasarkan Gambar 1.2 dan 1.3 dapat disimpulkan bahwa Dana Perimbangan memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan Pendapatan

Asli Daerah terhadap total pendapatan. Selain itu porsi Dana Perimbangan tahun 2017 meningkat 2,5% dari tahun 2016 sedangkan porsi Pendapatan Asli Daerah 2017 hanya meningkat sebesar 1% dari tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa kemandirian keuangan daerah belum optimal, karena komponen pendapatan daerah masih didominasi oleh bantuan dari pemerintah pusat dibandingkan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri.

Vidi priyantomo (2007) dalam Munafe et.al (2018:128) menjelaskan bahwa kebijakan desentralisasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat dengan memberi wewenang yang lebih luas bagi daerah untuk mengatur dan mengelola sendiri keuangannya sekaligus menanggung beban-beban yang selama ini ditanggung pemerintah pusat, tentu menjadi tantangan tersendiri untuk pemerintah daerah seiring dengan pelimpahan wewenang yang membutuhkan dana untuk membiayai kebutuhannya.

Ketika daerah diberikan wewenang dan kebebasan untuk mengelola sendiri keuangan daerahnya, hal ini seharusnya dapat dijadikan peluang bagi daerah untuk lebih menggali dan mengoptimalkan potensi-potensi daerah yang dapat dijadikan sumber Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai belanja daerahnya.

Namun pada kenyataannya setiap daerah memiliki kesiapan yang berbeda. Menurut Rinaldi dan Nuryasman (2013:79) daerah yang kaya memiliki sumber penerimaan dari pajak daerah, retribusi daerah dan sumber daya alam yang dapat dijadikan sumber penerimaan daerah. Namun bagi daerah yang tidak memiliki potensi Pendapatan Asli Daerah yang memadai, otonomi daerah akan menimbulkan persoalan karena adanya tuntutan untuk meningkatkan kemandirian

daerah, sehingga daerah beresiko mengalami *fiscal stress* yang lebih tinggi dibandingkan sebelum otonomi.

Menurut Muryawan serta Sukarsa (2014) dalam Sibuea (2017:4) menjelaskan bahwa *fiscal stress* diakibatkan karena keterbatasan penerimaan pendapatan pemerintah daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan dan meningkatkan kemandirian di daerahnya.

Tingginya angka upaya pajak merupakan inisiatif dari pemerintah daerah dalam rangka penerapan otonomi daerah. Upaya pajak atau *tax effort* menunjukkan usaha pemerintah daerah dalam menggali potensi penerimaan daerahnya untuk terus meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara keseluruhan sehingga ketergantungan pemerintah daerah terhadap dana dari pemerintah pusat dapat dibatasi. Al-latief (2018:35)

Sehingga di era otonomi ini, pemerintah daerah harus terus berupaya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka mengurangi ketergantungan pada bantuan dari pemerintah pusat dan pinjaman daerah sehingga kemandirian keuangan daerahnya meningkat serta untuk menghindarkan daerah dari tekanan fiskal atau *fiscal stress*.

Namun fenomena yang saat ini terjadi adalah ketika Pendapatan Asli Daerah mengalami keterbatasan untuk menutup pengeluaran daerahnya maka dibandingkan dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan PAD, pemerintah daerah cenderung lebih mengandalkan Dana Perimbangan dari pemerintah pusat untuk memenuhi kebutuhannya mengingat kontribusi dari Lain-lain Pendapatan yang Sah relatif kecil, disamping itu alternatif pinjaman daerah

justru akan menambah beban keuangan daerah, sehingga kondisi ini menyebabkan ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer pemerintah pusat.

Hal ini didasarkan pada berita dari Detiknews (30/01/2019) yang ditulis oleh Yoga Nurdiana Nugraha bahwa alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2019 yang meningkat 9% dari realisasi 2018 atau meningkat 45,1 % dari realisasi 2014. Dimana TKDD ini terdiri dari Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam serta Dana Otonomi Khusus, dengan jumlah sebesar itu pemerintah pusat menaruh kepercayaan besar pada daerah untuk mengelola dana tersebut sesuai kewenangannya.

Namun Kondisi yang diharapkan ternyata berbanding terbalik dengan kenyataan, keadaan tersebut justru membuat daerah ketergantungan terhadap dana transfer yang berasal dari pemerintah pusat. Menurut Menteri Keuangan Sri Mulyani ketergantungan terhadap TKDD masih sangat tinggi, secara rata-rata nasional ketergantungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap TKDD sebesar 80,1% sementara kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) hanya sekitar 12,87%. Sehingga secara implisit pemerintah daerah cenderung pasif dalam mengelola potensi PAD-nya. (Nugraha, 2019)

Jika ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat terus berlangsung, maka meningkatkan pembangunan berarti pula meningkatkan beban anggaran pusat yang berdampak pada semakin beratnya beban APBN. Oleh karena itu sistem pemerintahan desentralisasi dengan meningkatkan kemandirian daerah melalui optimalisasi Pendapatan Asli Daerah untuk membiayai kebutuhan daerah

dan mengurangi ketergantungan terhadap pemerintah pusat seharusnya dapat diwujudkan agar pemerintah daerah terhindar dari *fiscal stress*.

Sehingga penelitian yang bertujuan untuk membuktikan asumsi bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah tidak serta merta dapat menghindarkan daerah dari *fiscal stress* melalui kemandirian keuangan daerah perlu dilakukan, hal ini didasarkan fenomena perilaku asimetri pemerintah daerah yang saat ini terjadi mengindikasikan bahwa *fiscal stress* tidak lagi dilatarbelakangi upaya pemerintah daerah untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dalam rangka membiayai pembangunan daerahnya dengan bersandar pada penerimaan asli daerah sebagai usaha meningkatkan kemandirian keuangan daerah, karena saat ini pemerintah daerah cenderung lebih mengandalkan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerahnya, hal ini dapat dilihat dari porsi Dana Transfer yang lebih besar dibandingkan porsi PAD terhadap total penerimaan daerah.

Selain itu, hal ini juga didasarkan pertimbangan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Munfarida (2017:6) pada 35 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa peningkatan Pendapatan Asli Daerah mungkin saja mengakibatkan *fiscal stress*, hal tersebut bergantung pada fenomena pertumbuhan pendapatan dan belanja modal yang ada. Sehingga ketika fenomena pertumbuhan dana transfer dari pemerintah pusat lebih tinggi dibandingkan Pendapatan Asli Daerah itu sendiri mungkin menghasilkan kesimpulan yang berbeda.

Berikut ini adalah ringkasan dari hasil penelitian terdahulu mengenai Pendapatan Asli Daerah, *Fiscal Stress* dan Kemandirian Keuangan Daerah.

1. Rinaldi dan Nuryasman MN (2013) meneliti mengenai: Pengaruh Realisasi Belanja Modal, *Fiscal Stress*, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap Kemandirian Keuangan Daerah Studi Empiris pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Timur. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa belanja modal, *fiscal stress* dan PDRB secara simultan berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah di Provinsi Kalimantan Timur. Pengeluaran sebagian belanja modal serta *fiscal stress* tidak signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan PDRB memiliki dampak yang signifikan terhadap kemandirian keuangan kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur.
2. Finky Septira dan Ida Farida (2019) meneliti mengenai: Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* pada Kabupaten dan kota se-Sumatera Tahun 2014-2016. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan ekonomi yang diprosikan oleh PDRB berpengaruh terhadap *fiscal stress* sedangkan pertumbuhan belanja modal tidak berpengaruh terhadap *fiscal stress*.
3. Iskandar Muda (2012) meneliti mengenai: Variabel yang Mempegaruhi *Fiscal Stress* Studi pada 25 dari Total 33 Kabupaten/Kota Sumatera Utara tahun 2004-2009. Hasil dari penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah, pertumbuhan ekonomi regional yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dan pertumbuhan belanja modal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*, namun secara parsial hanya Pendapatan Asli Daerah yang memiliki pengaruh signifikan terhadap *fiscal stress*.

4. Mesri W Munafe et.al (2018) meneliti mengenai *Fiscal Stress*: Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Studi pada 6 Kabupaten/Kota dari 21 Kabupaten/Kota di Nusa Tenggara Timur 2014-2016. Hasil penelitian ini adalah bahwa *fiscal stress* tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan pertumbuhan belanja modal.
5. Indrawati et.al. (2017) meneliti mengenai: Variabel yang Mempengaruhi *Fiscal Stress* di Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB dan Pertumbuhan Belanja Modal secara parsial tidak berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*, namun Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*. Secara Simultan Pertumbuhan PAD, Pertumbuhan PDRB, Pertumbuhan Belanja Modal, Desentralisasi Fiskal dan Diversifikasi Pendapatan berpengaruh terhadap *Fiscal Stress*.
6. Armaini et.al. (2019) meneliti mengenai: Determinan *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Selatan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa PAD, Kinerja Keuangan Daerah yang diukur dengan Kemandirian Keuangan Daerah dan Belanja Modal tidak berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress*, namun Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh signifikan terhadap *Fiscal Stress* pada Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Selatan.
7. Rosmiaty Tarmidzi (2010) meneliti mengenai: Pendapatan Asli Daerah yang Berdampak pada Kemandirian Keuangan Daerah. Hasil penelitian ini adalah kemandirian Kodya Bandar Lampung masih rendah, hal ini dikarenakan rata-rata kontribusi Pendapatan Asli Daerah hanya 8,06 % dan rasio Bagi Hasil Pajak

dan Bukan Pajak hanya sebesar 12,51% terhadap total penerimaan daerah, sehingga kemandiriannya tergolong masih rendah. Kemampuan membiayai belanja rutin dan pembiayaan rutin juga masih rendah sehingga bergantung pada pemerintah pusat/provinsi.

8. Afrizal Tahar dan Maulida Zakhiya (2011) meneliti mengenai: Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum terhadap Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah. Hasil penelitian ini adalah PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah dan DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah. Namun disamping itu DAU, PAD serta kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi.
9. Dwi Purnamasari (2017) meneliti mengenai: Analisis Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun Anggaran 2010-2014. Hasil penelitian ini adalah kontribusi PAD dalam APBD masih rendah sehingga kemandirian juga masih rendah karena kurangnya komitmen untuk meningkatkan PAD dan kurangnya inovasi dalam menggali potensi daerah untuk menghasilkan PAD.
10. Dina Apriana dan Rudy Suryanto (2010) meneliti mengenai: Analisis Hubungan antara Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi Daerah pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali. Hasil penelitian ini adalah PAD berdampak positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah, namun komposisinya masih sangat kecil dibandingkan Dana Alokasi Umum dari pemerintah pusat, sehingga daerah perlu meningkatkan sumber andalan PAD yaitu Pajak dan Retribusi Daerah.

11. Oktaviani dan Tjahyono (2016) meneliti tentang Pengaruh Rasio Efektivitas, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Tingkat Kemandirian Daerah pada kabupaten/kota di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hasil penelitian ini adalah Pendapatan Asli Daerah tidak berpengaruh terhadap tingkat Kemandirian Keuangan Daerah. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Kemandirian Keuangan Daerah
12. Baihaqi (2012) Analisis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Kemandirian Daerah PAD Kabupaten/Kota Bengkulu Tengah. Hasil penelitian ini tidak terdapat hubungan antara transfer pemerintah pusat dengan kemandirian daerah namun terdapat hubungan antara PAD dengan kemandirian keuangan daerah dan tidak ada hubungan investasi daerah dengan kemandirian daerah.
13. Sanga et.al (2018) meneliti mengenai Pengaruh Penerimaan Daerah terhadap Kemandirian Keuangan Daerah dengan Belanja Daerah sebagai Intervening. Hasil penelitian ini adalah PAD dan Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan belanja modal tidak dapat memediasi pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah.
14. Budi Setyawan dan Priyo Hari Adi (2007) Pengaruh *Fiscal Stress* terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal. Hasil Dari Penelitian ini adalah *Fiscal Stress* berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah dan selain itu *Fiscal Stress* memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja pembangunan atau belanja modal.

15. Baihaqi (2011) meneliti mengenai: Analisis Kontribusi Pendapatan Asli Daerah terhadap Pendapatan Daerah Provinsi Bengkulu. Hasil penelitian ini adalah sektor Pajak Daerah sangat berperan terhadap total Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan Asli Daerah terbesar kedua setelah pajak daerah.
16. Eve ida Malau et.al (2019) meneliti mengenai: *The Effect of Local Government Revenue (LGR), Balance Fund, Capital Expenditure and Fiscal Stress on The Financial Performance of Regional Government in The Distric of Sumatera Utara Province 2010 to 2017*. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa Dana Alokasi Umum, *Balance Funds* dan *Fiscal Stress* secara persial berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah, sedangkan *The Local of Government Revenue (LGR)* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.
17. Arnett, S (2011) meneliti mengenai: *Fiscal Stress in The U.S. States: An Analysis of Measure and Responses*. Hasil penelitian ini adalah Respon setiap negara terhadap *fiscal stress* akan berbeda sesuai dengan tingkat keparahan *fiscal stress* itu sendiri, dan faktor kelembagaan akan mempengaruhi respon negara terhadap *fiscal stress* negara bagian, negara dengan struktur yang defisit akan mengalami tekanan fiskal lebih tinggi, dimana efek jangka pendek dari respon negara (misalnya kenaikan pajak dan pemotongan pengeluaran) terhadap *fiscal stress* akan minimum, serta efek jangka panjang dari respon negara (misalnya kenaikan pajak dan pemotongan pengeluaran) terhadap *fiscal stress* akan berbeda.

18. Anggie Rut Daniela dan Muryani (2019) meneliti mengenai: *Analysis of Factors in Forming Fiscal Stress Index Case Study: The Indonesian Government Budget*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dari 13 variabel yang telah diuji, berikut ini adalah faktor yang dapat menyebabkan tekanan fiskal di Indonesia adalah pengeluaran negara, faktor hutang, pengeluaran pendidikan, Dana Alokasi Umum, Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Khusus, pengeluaran kesehatan, pembayaran bunga utang, kewajiban negara dan jumlah penduduk.
19. Evgenia Gorina dan Craig Maher (2016) meneliti mengenai: *Measuring and Modeling Determinants of Fiscal Stress in US Municipalities*. Hasil penelitian ini adalah pengurangan tingkat cadangan fiskal daerah adalah prediktor yang kuat untuk masalah fiskal dan peningkatan utang sebagai bagian dari total pendapatan meningkatkan kemungkinan *fiscal stress*. Sehingga penganggaran sangat penting untuk menghasilkan kebijakan di tingkat daerah tentang ukuran saldo dana yang tepat dan tingkat utang yang tepat, dan ketergantungan daerah terhadap pajak properti berhubungan negatif dengan *fiscal stress*.
20. Craig S. Maher dan Steven C. Deller (2013) meneliti mengenai: *Measuring Financial Condition: An Essential Element of Management During periods of Fiscal Stress*. Hasil Penelitian ini adalah bahwa Pengukuran objektif kondisi fiskal dapat dilakukan dengan bantuan antar pemerintah sebagai persentase dari total pendapatan dana umum, pajak sebagai persentase dari total pendapatan dana umum, surplus defisit pada tahun fiskal sebagai persentase dari total pendapatan dana umum dan utang sebagai persentase dari total pendapatan.

Tabel 1.1

## Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Penulis

No	Peneliti, Tahun, dan Tempat	Persamaan Penelitian	Perbedaan Penelitian	Simpulan Penelitian	Sumber
1	<b>Rinaldi &amp; Nuryasman (2013)</b> Studi empiris pada pemerintah kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Timur 2006-2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel: <i>fiscal stress</i> dan kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen: realisasi belanja modal, <i>fiscal stress</i> dan PDRB</li> <li>• Variabel dependen: kemandirian keuangan daerah</li> <li>• Analisis regresi</li> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> <li>• Data Panel</li> </ul>	<i>Fiscal Stress</i> tidak berpengaruh signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Ekonomi Universitas Tarumanegara Vol.18 No.1 ISSN : 0854-9842 (2013)
2	<b>Finky Septira &amp; Ida Farida (2019)</b> Sensus pada kabupaten/kota se-Sumatera 2014-2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen : pertumbuhan PAD</li> <li>• Variabel independen : <i>fiscal stress</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen: realisasi belanja modal, dan pertumbuhan ekonomi</li> <li>• Data Panel</li> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> </ul>	Pertumbuhan PAD berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>	Jurnal Pendidikan Akuntansi dan Keuangan Universitas Pendidikan Indonesia Vol.7 No.1
3	<b>Iskandar Muda (2012)</b> Survei pada kabupaten/kota se-Sumatera 2004-2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen : pertumbuhan PAD</li> <li>• Variabel independen : <i>fiscal stress</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen: pertumbuhan belanja modal, pertumbuhan ekonomi (PDRB)</li> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> </ul>	Hanya pertumbuhan PAD yang secara parsial berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>	Jurnal Keuangan & Bisnis Program Studi Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Harapan Vol 4. No.1
4	<b>Mesri. W. Munafet al (2018)</b> Sutudi pada kabupaten/kota di Nusa Tenggara Timur 2014-2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : <i>fiscal stress</i></li> <li>• Variabel dependen : pertumbuhan PAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen: pertumbuhan belanja modal</li> <li>• Regresi sederhana</li> <li>• Data Panel</li> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> </ul>	<i>Fiscal stress</i> tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan PAD	Wahana Jurnal Ekonomi, Manajemen dan Akuntansi Vol.21.No.2

5	<b>Indrawati et.al (2017)</b> Studi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau tahun 2010-2015	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : <i>fiscal stress</i></li> <li>• Variabel dependen : pertumbuhan PAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Regresi Berganda</li> <li>• Tidak ada intervening Data panel</li> </ul>	Pertumbuhan PAD tidak berpengaruh terhadap <i>fiscal stress</i>	Jurnal Ekonomi. Vol.25. No.2
6	<b>Armaini et.al (2019)</b> Studi pada Kabupaten/Kota se-Provinsi Sumatera Selatan tahun 2015-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen: <i>fiscal stress</i></li> <li>• Variabel dependen : PAD, kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian berbentuk determinan dengan variabel: pertumbuhan ekoomi, PAD, kemandirian keuangan daerah dan belanja modal</li> <li>• Data Panel</li> <li>• Regresi Berganda</li> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> </ul>	PAD, belanja modal dan kemandirian keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i> . Namun pertumbuhan ekonomi berpengaruh signifikan terhadap <i>fiscal stress</i>	Jurnal Riset Terapan Akuntansi Politeknik Negeri Sriwijaya. Vol.3.No.1 ISSN : 2579-969X
7	<b>Rosmiyati Tarmizi (2010)</b> Studi kasus pada Kodya Bandar Lampung	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Penelitian menguji tingkat kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jenis penelitian studi kasus</li> <li>• Variabel independen: kemandirian keuangan daerah</li> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> </ul>	Kemandirian keuangan daerah pada kodya Bandar Lampung masih rendah, karena PAD dan proporsi bagi hasil pajak dan bukan pajak terhadap total penerimaan daerah masih rendah. kemampuan membiayai belanja rutin dan pembiayaan rutin masih rendah sehingga bergantung pada pemerintah pusat/provinsi	Jurnal Akuntansi dan Keuangan Vol.1 No.1
8	<b>Afrizal Tahar dan Maulida Zakhya (2011)</b> Survei di 56 kabupaten/kota Pulau Kalimantan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen: PAD</li> <li>• Variabel intervening: kemandirian daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : DAU</li> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> <li>• Variabel</li> </ul>	PAD berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian daerah. DAU berpengaruh negatif signifikan terhadap	Jurnal Akuntansi dan Investasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Vol.2. No.3.

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data <i>cross section</i></li> </ul>	Dependen : pertumbuhan ekonomi daerah	kemandirian keuangan daerah. PAD dan kemandirian daerah tidak berpengaruh signifikan pada pertumbuhan ekonomi	
9	<b>Dwi Purnamasari (2017)</b> Studi pada Kabupaten Sidoarjo tahun 2010-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Menguji tingkat kemandirian daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian kualitatif</li> <li>• Data <i>time series</i></li> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> </ul>	Kontribusi PAD dalam APBD masih rendah sehingga kemandirian daerah masih rendah karena kurangnya komitmen dan inovasi dalam menggali potensi daerah untuk menghasilkan PAD	Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik. Universitas Muhammadiyah Sidoarjo ISSN: 2527-9246
10	<b>Dina Apriana dan Rudi Suryanto (2010)</b> Studi pada kabupaten dan kota se Jawa-Bali	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meneliti hubungan PAD dan kemandirian keuangan daerah</li> <li>• Data <i>Cross Section</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis hubungan</li> <li>• Variabel: belanja modal, PAD, kemandirian daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah</li> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> </ul>	PAD berdampak positif signifikan terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Akuntansi dan Investasi Universitas Muhammadiyah Yogyakarta Vol 11.No.1.
11	<b>Oktaviani dan Tjahjono (2016)</b> Studi pada Kabupaten/kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2010-2014	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : kemandirian keuangan daerah</li> <li>• Variabel dependen : Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen lainnya yaitu : Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus</li> <li>• Subjek penelitian pemerintah daerah tingkat II</li> <li>• Data Panel</li> <li>• Tidak terdapat variabel intervening</li> </ul>	PAD tidak berpengaruh terhadap tingkat kemandirian keuangan daerah. Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Kajian Bisnis. Vol. 24. No. 1
12	<b>Baihaqi (2012)</b> Studi pada Pemerintah Daerah Bengkulu Tengah 2009-2011	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen : PAD</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen: transfer pemerintah pusat, investasi daerah</li> <li>• Variabel Independen:</li> </ul>	tidak terdapat hubungan antara transfer pemerintah pusat dengan kemandirian daerah namun	Jurnal Fairness Vol.2. No.1. 1-14

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• kemandirian keuangan daerah</li> <li>• Tidak terdapat variabel intervening</li> <li>• Data Panel</li> </ul>	terdapat hubungan antara PAD dengan kemandirian keuangan daerah serta tidak ada hubungan antara investasi daerah dengan kemandirian keuangan daerah.	
13	<b>Sanga et.al (2018)</b> Survei pada 22 Kabupaten/Kota NTT 2011-2016	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meneliti hubungan penerimaan daerah terhadap kemandirian keuangan daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen: penerimaan daerah</li> <li>• Variabel independen: kemandirian keuangan daerah</li> <li>• Tidak ada Variabel intervening</li> <li>• Data Panel</li> </ul>	PAD dan dana perimbangan berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan daerah sedangkan DAU dan DAK tidak berpengaruh terhadap kemandirian keuangan daerah dan belanja modal tidak dapat memediasi pengaruh PAD terhadap kemandirian keuangan daerah	Jurnal Akuntansi dan Keuangan. Vol.19.No.2. ISSN: 2338-8137
14	<b>Budi Setyawan dan Priyo Hari Adi (2007)</b> Studi pada Kabupaten/Kota se-Jawa Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meneliti hubungan <i>fiscal stress</i> dan Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen: <i>fiscal stress</i></li> <li>• Variabel independen: Pertumbuhan PAD dan Belanja Modal</li> <li>• Tidak ada Variabel intervening</li> </ul>	<i>Fiscal Stress</i> berpengaruh positif signifikan pada pertumbuhan PAD dan selain itu <i>Fiscal Stress</i> memiliki pengaruh yang positif terhadap belanja pembangunan atau belanja modal.	Simposium Nasional Riset Ekonomi dan Bisnis Asosiasi Perguruan Tinggi Katolik (APTİK)
15	<b>Baihaqi (2011)</b> Studi pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2008	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meneliti mengenai Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Analisis Hubungan</li> <li>• Variabel dependen: Pendapatan Asli Daerah</li> <li>• Variabel Independen: Pendapatan Daerah</li> </ul>	Sektor pajak daerah sangat berperan bagi total Pendapatan Asli Daerah dan retribusi merupakan sumber terbesar kedua setelah pajak daerah.	Jurnal Akuntansi Universitas Bengkulu Vol.1.No.3. 246-266

			<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> <li>• Data <i>time series</i></li> </ul>		
16	<b>Malau et.al (2019)</b> Studi pada 33 kab/kota di Provinsi Sumatera Utara di tahun 2010-2017	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen : pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen: <i>fiscal stress</i> dan <i>balance funds</i></li> <li>• Variabel independen: kinerja keuangan daerah</li> <li>• Menggunakan regresi berganda</li> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> <li>• Data Panel</li> </ul>	<i>Fiscal stress</i> berpengaruh terhadap kinerja keuangan daerah	<i>International Journal of Public Budgeting, accounting and finance Vol.2 No.2</i>
17	<b>Sarah B Arnett (2011)</b> 50 Negara Bagian tahun 2002-2009	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : <i>fiscal stress</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian berupa analisis pengukuran dan respon terhadap <i>fiscal stress</i></li> <li>• objek penelitian: negara bagian</li> <li>• Data panel</li> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> </ul>	Respon negara bagian akan berbeda sesuai dengan tingkat keparahan <i>fiscal stress</i> , faktor kelembagaan mempengaruhi respon pada <i>fiscal stress</i> , negara dengan struktur defisit akan mengalami tekanan fiskal yang tinggi, efek jangka pendek dari respon negara pada <i>fiscal stress</i> akan minimal dan efek jangka panjang respon negara terhadap <i>fiscal stress</i> akan berbeda.	<i>ScholarWorks Georgia State University</i>
18	<b>Anggie Rut Daniela Dan Muryani (2019)</b> Studi pada Fiskal dan demografi Indonesia tahun 2000-2013	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel independen : <i>Fiscal Stress</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Studi determinan</li> <li>• Data <i>time series</i></li> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> <li>• Studi pada pemerintah indonesia</li> <li>• Variabel dependen : variabel fiskal dan demografis</li> </ul>	faktor–faktor yang dapat menyebabkan tekanan fiskal di indonesia adalah pengeluaran negara, faktor hutang, pengeluaran pendidikan, DAU, Dana Bagi Hasil, pengeluaran negara, faktor	<i>International Journal of Advances in Scientific Research and Engineering (ijasre). Vol 5.No.3. E-ISSN: 2654-8006</i>

			dalam bentuk penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, belanja sektor pendidikan, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, pengeluaran kesehatan, BBM, bunga utang, pengeluaran karyawan, kewajiban negara, dan populasi jumlah penduduk.	hutang, , Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil, pengeluaran pendidikan, pengeluaran kesehatan, pembayaran bunag utang, kewajiban negara, jumlah penduduk	
19	<b>Evgenia Gorina dan Craig Maher (2016)</b> Survey Pada 300 pemerintahan kota/ kabupaten di California, Michigan tahun 2007-2012	• Variabel independen : <i>fiscal stress</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Variabel dependen: laporan keuangan tahunan, anggaran dan liputan media</li> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> <li>• Data Panel</li> </ul>	Pengurangan cadangan fiskal dan peningkatan utang akan meningkatkan <i>fiscal stress</i> . Selain itu ketergantungan daerah terhadap pajak properti berhubungan negatif dengan <i>fiscal stress</i> .	<i>Marcetus Working Paper George Mason University</i>
20	<b>Craig Maher dan Steven Deller (2013)</b> Studi pada Kota San Bernardino dan Kota Spokane tahun 2007-2011	• Menganalisa pengaruh <i>fiscal stress</i> terhadap kondisi keuangan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penelitian berupa pengukuran kondisi keuangan selama <i>fiscal stress</i></li> <li>• Terdapat dua daerah yang diteliti</li> <li>• Data Panel</li> <li>• Tidak ada variabel intervening</li> </ul>	Pengukuran objektif kondisi fiskal dilakukan dengan menilai bantuan antar pemerintah, pajak serta surplus defisit pada tahun fiskal dan utang	<i>Journal of Government Financial Management</i>
<b>Sofia Asharini (2020) 163403055</b>					
Pengaruh Tingkat Pendapatan Daerah terhadap <i>Fiscal Stress</i> melalui Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening (Survei pada 29 Provinsi di Indonesia Tahun 2018).					

Berdasarkan uraian diatas, penulis tertarik dan termotivasi untuk melakukan penelitian mengenai hubungan antara Tingkat Pendapatan Asli Daerah, *Fiscal Stress* dan Kemandirian Keuangan Daerah dengan judul **Pengaruh Tingkat Pendapatan Daerah terhadap *Fiscal Stress* melalui Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening (Survei pada 29 Provinsi di Indonesia Tahun 2018).**

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Tingkat Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah dan *Fiscal Stress* pada 29 Provinsi di Indonesia.
2. Bagaimana pengaruh Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* pada 29 Provinsi di Indonesia.
3. Apakah Kemandirian Keuangan Daerah mampu memediasi pengaruh Pendapatan Daerah terhadap *Fiscal Stress* pada 29 Provinsi di Indonesia.

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun yang menjadi tujuan dari dilaksanakannya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui Tingkat Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah dan *Fiscal Stress* pada 29 Provinsi di Indonesia

2. Untuk mengetahui pengaruh Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* pada 29 Provinsi di Indonesia.
3. Untuk mengetahui apakah Kemandirian Keuangan Daerah mampu memediasi pengaruh Tingkat Pendapatan Asli Daerah terhadap *Fiscal Stress* pada 29 Provinsi di Indonesia.

#### **1.4 Kegunaan Hasil Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi pihak yang membutuhkan sebagai berikut :

1. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan bukti empiris mengenai pengaruh Tingkat Pendapatan Daerah terhadap *Fiscal Stress* melalui Kemandirian Keuangan Daerah Sebagai Variabel Intervening.
2. Bagi pemerintah daerah terkait, penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi atau rujukan dalam menetapkan kebijakan keuangan pemerintah daerah serta menjadi dasar dalam pengambilan keputusan terutama yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Kemandirian Keuangan Daerah maupun *Fiscal Stress*.
3. Bagi Pemerintah pusat, penelitian ini dapat memberikan masukan dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan pemerintah pusat agar terciptanya otonomi daerah yang sesuai dengan amanat Undang-Undang dalam rangka mensejahterakan masyarakat.
4. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini dapat dipergunakan sebagai rujukan dalam melanjutkan serta mengembangkan penelitian terkait.

## **1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian**

### **1.5.1 Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan pada 29 provinsi yang ada di Indonesia. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari situs resmi Direktorat Jendral Perimbangan Keuangan ([www.djpk.kemenkeu.go.id](http://www.djpk.kemenkeu.go.id)). Sehingga tidak ada lokasi khusus yang dijadikan sebagai tempat penelitian.

### **1.5.2 Waktu Penelitian**

Demi terlaksananya penelitian yang efektif dan efisien, peneliti menyusun waktu penelitian yang dilaksanakan selama 6 (enam) bulan dimulai bulan Februari sampai dengan Juli 2020.